



Per Hari 600 Ton Disetor ke Piyungan

MESKI regulasi telah dibuat melalui Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, tetapi kesadaran masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan pengelolaan sampah belum sepenuhnya terlihat. Terhitung sudah tujuh tahun sejak perda tersebut diberlakukan, kesadaran masyarakat DIY untuk mengolah sampah sejak hulu belum sepenuhnya diterapkan.

Hal itu diakui Kepala Balai Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Fauzan Umar. Dia mengatakan, seharusnya persoalan sampah rumah tangga sudah dikelola sejak dari tingkat keluarga.

Aturan tersebut telah tertuang dalam perda nomor 3 Tahun 2013. Namun, pada kenyataannya membudayakan masyarakat agar memilah sampah sejak dari sumbernya memang sulit. "Harusnya dari tingkat sumbernya dulu. Setelah itu tingkat kabupaten/kota kembali menyortir. Tapi sejauh ini sampah itu tercampur," katanya saat dihubungi Tribun Jogja, Minggu (30/8).

● ke halaman 7

Per Hari

● Sambungan Hal 1

Fauzan menambahkan, dalam Perda nomor 3 Tahun 2013 tersebut Pemda DIY maupun tingkat kabupaten/kota memang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terkait upaya pengurangan dan penanganan masalah sampah.

Selain itu, Pemda DIY mewajibkan penetapan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang berdasarkan standar minimal pemerintah. Saat disinggung berapa indikator tingkat pencemaran sampah dan penanganan sampah di DIY, Fauzan belum bisa memberikan keterangan. "Kalau itu ada di bidang lain. Belum bisa saya jawab. Namun ada indikatornya memang," ungkapnya.

Dia menjelaskan, rata-rata per hari sampah di TPST Piyungan dari tiga wilayah, yakni Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta mencapai 620 ton. Dengan 240,56 ton termasuk sampah organik bersumber dari rumah tangga dan sampah sejenisnya.

Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta jumlah tersebut masih jauh di bawahnya. Lantaran DLHK DIY menyebut jika sampah organik di DIY masih 40 persen. Sedangkan wilayah DKI konsumsi sampah organik mencapai sekitar 70 persen. Sebetulnya, jumlah tersebut jika diolah akan menghasilkan pupuk kompos yang cukup berlimpah. Namun demikian, pemda belum melakukan hal itu. Termasuk program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga masih panjang prosesnya. "Program KPBU masih proses kajian kelayakan. Jadi arah pengelolaan sampah kami masih belum jelas. Saya belum bisa menyampaikannya metode pengelolaan seperti apa," pungkasnya. (hda)

Sebetulnya, jumlah tersebut jika diolah akan menghasilkan pupuk kompos yang cukup berlimpah. Namun demikian, pemda belum melakukan hal itu. Termasuk program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga masih panjang prosesnya. "Program KPBU masih proses kajian kelayakan. Jadi arah pengelolaan sampah kami masih belum jelas. Saya belum bisa menyampaikannya metode pengelolaan seperti apa," pungkasnya. (hda)

Sebetulnya, jumlah tersebut jika diolah akan menghasilkan pupuk kompos yang cukup berlimpah. Namun demikian, pemda belum melakukan hal itu. Termasuk program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga masih panjang prosesnya. "Program KPBU masih proses kajian kelayakan. Jadi arah pengelolaan sampah kami masih belum jelas. Saya belum bisa menyampaikannya metode pengelolaan seperti apa," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005